

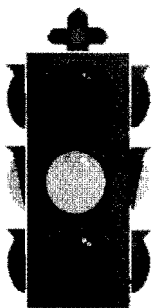


Dr. Ir. H. Juniarso Ridwan, M.Si., M.H.
Achmad Sodik Sudrajat, S.H., M.H.

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

DAN KEBIJAKAN LAYANAN PUBLIK

Dilampiri:
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik



Daftar Isi

Kata Pengantar — 5

Pendahuluan — 11

**BAB I PROSPEK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
DALAM NEGARA HUKUM DAN NEGARA KE-
SEJAHTERAAN — 17**

- A. Esensi Pelayanan Publik — 17
- B. Konsep dan Perkembangan Tipe Negara Hukum — 24
- C. Negara Kesejahteraan dan Hukum Administrasi Negara — 52

**BAB II HUKUM DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN
DAN PERUBAHAN SOSIAL — 66**

- A. Pokok Pemikiran Tentang Hukum — 69
- B. Hukum dalam Konsep Kesejahteraan Masyarakat — 75

BAB III PELAYANAN PUBLIK DALAM KONSEP GOOD GOVERNANCE — 81

- A. Konsep *Good Governance* — 81
- B. Pelayanan Publik dalam Konsep *Good Governance* — 83

BAB IV ASPEK HUKUM DALAM PELAYANAN PUBLIK — 90

- A. Konsep Dasar Perizinan — 90
- B. Perizinan Sebagai Instrumen Hukum Sikap Tindak Administrasi Negara — 96
- C. Program Dasar Penyelenggaraan Pelayanan Publik — 100

BAB V OTONOMI DAERAH SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN — 109

- A. Otonomi Daerah — 109
- B. Latar Belakang — 112
- C. Dasar Kebijakan — 116
- D. Azas-azas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah — 120
- E. Otonomi Daerah dan upaya Peningkatan Pelayanan Publik — 127

BAB VI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK — 133

- A. Kewenangan Pemerintah — 133
- B. Tindakan Hukum Pemerintah — 141
- C. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik — 143

BAB VII KONSEP DAN ARAH KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH — 150

- A. Konsep Kebijakan — 150
- B. Konsep dan Arah Kebijakan dalam Pelayanan Publik — 161

- C. Deregulasi dan Debirokratisasi: Fungsi Pelayanan dan Pengaturan — 170
- D. Pelayanan Satu Pintu Ditinjau dari AAUPL — 174
- E. Kebijakan Sistem Perizinan dan Upaya Peningkatan Pelayanan Publik — 187
- F. Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu — 203

BAB VIII HARMONISASI HUKUM DALAM PENGATURAN FUNGSI DAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN — 213

- A. Harmonisasi Hukum dan Sistem Hukum — 213
- B. Harmonisasi dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan — 223
- C. Harmonisasi Kewenangan Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu — 228

Daftar Pustaka — 235

LAMPIRAN

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik — 249
- Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik — 285

Indeks — 313

Tentang Penulis — 319